

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, baik melalui program bantuan langsung ataupun melalui APBD. Kebijakan yang melalui program bantuan langsung diantaranya Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, subsidi Listrik, dan program bantuan lainnya.¹ Kebijakan pemerintah yang melalui APBD disesuaikan dengan keadaan disetiap daerah. Karena kebutuhan ekonomi disetiap daerah memiliki perbedaan yang signifikan. Kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan cenderung bergantung pada sektor agraris dengan produktivitas yang relatif rendah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Usaha Milik (BUM) Desa merupakan salahsatu rencana strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam sektor ekonomi. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²

BUM Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat. Namun pada sebagian Desa, BUM Desa belum dikelola dengan

¹ Novrizaldi, 'Ini Ragam Upaya Pemerintah Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial', *Kemenkopmk.go.id* (March 2024) <<https://www2.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial>>.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.

maksimal. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan dana anggaran serta peran aktif akademisi ditingkatkan. Partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi peran penting. Namun penanggungjawab utamanya adalah pemangku kebijakan atau pemerintah setempat.³

Kondisi infrastruktur pedesaan yang ada di Indonesia, cenderung lebih minim dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk memajukan Desa. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang efektif untuk bersama-sama membangun desa dan menyejahterakan masyarakat dengan berbagai tantangan.

Kacamatan Jatiwaras merupakan salahsatu kecamatan yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Jatiwaras memiliki BUM Desa yang menjadi *role model* bagi Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Pancamandala⁴. Bumdesma Pancamandala merupakan Badan Usaha yang didirikan atas kesepakatan lima Desa di Kecamatan Jatiwaras yaitu Desa Papayan, Ciwarak, Mandalamekar, Mandalahurip dan Kertarahayu. Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Jatiwaras yaitu 11 Desa dan memiliki luas wilayah 85 km^{2.5} Bumdesma Pancamandala yang terdiri dari lima Desa tersebut menguasai 52% wilayah kecamatan Jatiwaras. Pusatnya terletak di Desa Mandalamekar yang kondisi geografis desanya cukup jauh dari pusat

³ Irkham Abdur Rochim, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)

⁴ Kata Desa, 'Belajar Kesuksesan Bumades Di Tasikmalaya', *Katadesa.Id*, 2021 <<https://katadesa.id/index.php/daya-desa/potensi-desa/318-belajar-kesuksesan-bumades-di-tasikmalaya>>.

⁵ Karimuddin Abdullah and others, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. by Nanda Saputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012), 2021).

kecamatan. Meski begitu, Bumdesma Pancamandala berhasil mendapatkan keuntungan senilai 600 juta- 1 Milyar.

Bapak Irman Meilandi selaku Direktur Utama Bumdesma Pancamandala menuturkan bahwa BUM Desa memiliki tiga fungsi. Pertama, fungsi BUM Desa sebagai bisnis. Ini merupakan usaha BUM Desa untuk mendapatkan laba dari unit-unit usaha yang dijalankan. Kedua, BUM Desa memberikan kontribusi terhadap Pembangunan desa. Ketiga, berfungsi untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam kewirausahaan, dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan usahanya. Dari ketiga fungsi tersebut, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa.⁶

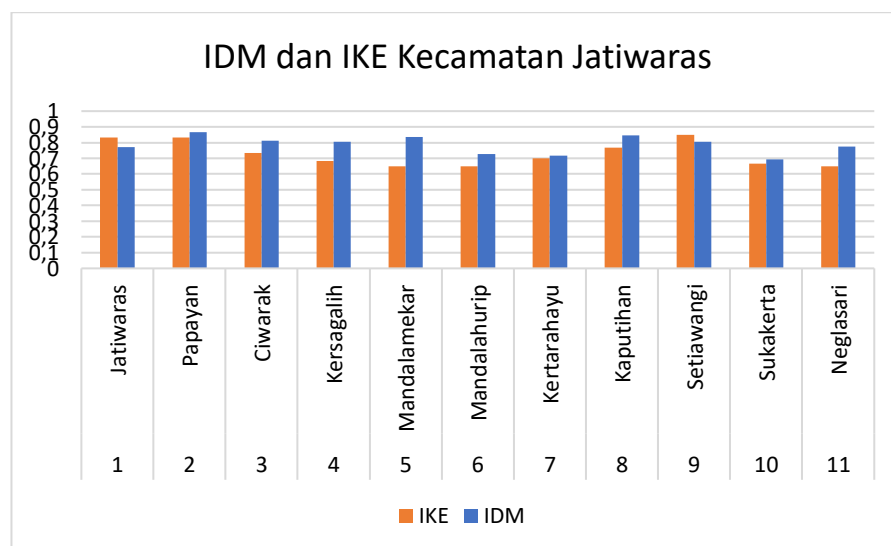
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mengukur keberhasilan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dengan menggunakan indikator-indikator berikut :

⁶ Irman Meilandi, Direktur Utama Bumdesma Pancamandala, Mandalamekar, 11 November 2024

Tabel 1.1 Indikator Desa Membangun

Indikator Komposit Desa Membangun	Dimensi
Sosial	Kesehatan
	Pendidikan
	Modal Sosial
	Permukiman
Ekonomi	Keragaman Produksi
	Perdagangan
	Akses Distribusi
	Akses Kredit
	Lembaga Ekonomi
	Keterbukaan Wilayah
Lingkungan	Kualitas Lingkungan
	Potensi dan tanggap Bencana

Sumber : Data diperoleh dari IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Gambar 1. 1 IDM dan IKE Kecamatan Jatiwaras

Keterangan :

Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$

Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$

Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$

Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$

Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$.

Sangat Prioritas : IKE 0-0,5

Prioritas : IKE 0,5-0,75

Terpenuhi : IKE 0,75-1

Berdasarkan grafik diatas, Kecamatan Jatiwaras memiliki tiga Desa mandiri yaitu Desa Papayan, Jatiwaras dan Setiawangi, dua Desa maju yaitu Desa Ciwarak dan Kaputihan dan enam Desa berkembang yaitu desa Mandalahurip, Mandalamekar, Kersagalih, Kertarahayu, Neglasari dan Sukakerta. Sedangkan dari segi indikator kesejahteraan ekonomi yang terpenuhi ada Papayan, Jatiwaras, Setiawangi dan Kaputihan. Tujuh Desa sisanya berada di posisi prioritas. Indikator kesejahteraan ekonomi ini dinilai berdasarkan keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, Lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Keragaman produksi di setiap desa telah terpenuhi karena memiliki lebih dari satu kegiatan ekonomi penduduk. Sedangkan dari aspek yang lainnya terdapat beberapa indikator yang tidak terpenuhi diantaranya tidak tersedianya pasar desa, jasa logistik, kantor pos, koperasi dan BUMDes serta tidak tersedianya usaha kedai makanan, restoran dan hotel atau penginapan. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi sudah terpenuhi, namun terdapat kendala dalam akses permodalan, distribusi dan pemasarannya.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, jumlah UMKM di Kecamatan Jatiwaras mencapai 1.221 unit.⁷ UMKM ini memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian daerah. UMKM yang ada di kecamatan Jatiwaras bergerak di berbagai sektor, seperti kerajinan, makanan, dan jasa. Namun, UMKM di Kecamatan Jatiwaras juga menghadapi beberapa permasalahan, seperti kurangnya daya saing dengan perusahaan-perusahaan

⁷ 'Tabel Data Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Memiliki Izin Usaha Menurut Kecamatan', *Sadara Kabupaten Tasikmalaya*, 2021
adara.tasikmalayakab.go.id/data_koperasi_kecil_menengah/koperasi_kecil_menengah_umkm.

besar, akses modal yang terbatas, dan kurangnya promosi serta pemasaran produk.⁸ Oleh karena itu, pemerintah desa dan lembaga ekonomi Desa seperti BUMDes perlu memberikan dukungan dan bantuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM lokal melalui berbagai unit usaha. Adapun unit usaha Bumdesma Pancamandala adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Unit Usaha Bumdesma Pancamandala

Nama Unit Usaha	Sasaran	Tujuan
Pondok Wisata	Pengunjung	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan wisata desa digital dengan cara menyediakan fasilitas dan akomodasi wisata yang baik bagi pengunjung serta memberikan edukasi mengenai digitalisasi desa.
Jasa Penyelenggara <i>Event Khusus (Special Event)</i>	Masyarakat dan instansi	Mengelola <i>event</i> secara profesional dan mewujudkan acara yang sesuai dengan kebutuhan klien mulai dari konsep, perencanaan, hingga pelaksanaan serta

⁸ Pemerintah Desa Papayan, 'Strategi Pemberdayaan Dan Peningkatan Daya Saing UMKM Lokal Di Desa Papayan', *Papayan.Desu.Id*, 2024 <<https://www.papayan.desa.id/strategi-pemberdayaan-dan-peningkatan-daya-saing-umkm-lokal-di-desapapayan/>>.

		memastikan acara berjalan lancar dan memenuhi harapan klien.
Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Perusahaan	Memberikan layanan perekrutan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan.
Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Masyarakat/siswa	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga dapat mendukung kebutuhan industri dan mengembangkan produktivitas ekonomi lokal.
<i>Internet Service Provider</i>	Masyarakat, pelaku usaha dan instansi	Memberikan konektivitas internet yang berkualitas dan meningkatkan akses komunikasi dan informasi berbasis internet.

Sumber : Data diperoleh dari Dokumen Bumdesma Pancamandala

Bumdesma Pancamandala telah menyelenggarakan berbagai pelatihan yang diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia seperti literasi digital, pelatihan jaringan internet, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan peternakan. Sasaran program diperuntukkan kepada masyarakat secara umum. Meskipun

sebagian besar peserta bukan perwakilan dari UMKM tetapi tidak menutup kemungkinan mereka memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan serta peluang yang ada untuk membuka usaha baru.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Bumdesma Pancamandala dalam Meningkatkan Indikator Kesejahteraan Ekonomi UMKM Kecamatan Jatiwaras”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana Upaya Bumdesma Pancamandala dalam meningkatkan Indikator Kesejahteraan Ekonomi UMKM Kecamatan Jatiwaras?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Bumdesma Pancamandala dalam meningkatkan Indikator Kesejahteraan Ekonomi UMKM Kecamatan Jatiwaras.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam ekonomi islam yang bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian

lanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi islam dalam pengelolaan sumber daya desa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dan Pengelola Bumdesma dalam meningkatkan kinerja. Penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana BUMDes dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan sosial ekonomi Islam.

c. Kegunaan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai peran Bumdesma, serta dapat memotivasi masyarakat umum dan pemerintahan daerah untuk bersinergi dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui Bumdesma.